



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-12.KP.03.03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. Direktur Jenderal Imigrasi;
10. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
11. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-12.KP.03.03 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 APRIL 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. ROBERIA, S.H., M.H. NIP. 197004232005011007	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H., M.H. NIP. 196506021992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	sda.
3.	AGUS WIDJAJA, S.Sos., M.M. NIP. 196308121983031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Kerja Sama Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
4.	Drs. HERU TJONDRO, M.H. NIP. 196407131989031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Direktur Kerja Sama Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
5.	ZAEROJI, S.Sos., M.H. NIP. 196211011985031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	sda.
6.	SUPARTONO, S.H., M.H. NIP. 196706221990031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
7.	SLAMET PRIHANTARA, Bc.I.P., S.H., M.Si. NIP. 196403011987031003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Direktur Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos., S.H., M.Si. NIP. 196811181991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
9.	PRIA WIBAWA, S.H. NIP. 196507281988031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	sda.
10.	I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM, S.H., M.H. NIP. 197102031991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
11.	Dr. HENDRA EKAPUTRA, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 197212241999021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.
12.	ILHAM DJAYA, S.H., M.H., M.Pd. NIP. 196412201991031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
13.	CENO HERSUSETIOKARTIKO, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 196907061992031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	sda.
14.	JAMARULI MANIHURUK, S.H., M.H., M.M. NIP. 196703301991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	sda.
15.	ANGGIAT NAPITUPULU, S.S., M.Si. NIP. 197202031999031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	sda.

1	2	3	4	5	6
16.	Dra. SRI LASTAMI, S.T., M.IPL. NIP. 196512311991032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
17.	HADIYANTO, S.H., M.H. NIP. 197208151994031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
18.	PAMUJI RAHARJA, S.H., M.M. NIP. 196701221991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	sda.
19.	TATO JULIADIN HIDAYAWAN, S.H., M.M. NIP. 196907291999031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	sda.
20.	JOHANES FANNY Satria CAHYA APRIANTO, A.Md.Im., S.H., M.H. NIP. 197704072000031001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	sda.
21.	YAYAN INDRIANA, S.H., M.Si. NIP. 196407051989031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	sda.
22.	Dr. MUHAMMAD YANI FIRDAUS, S.H., M.H. NIP. 196510011985031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	sda.
23.	MAS ARIE YULIANSA DWI PUTRA, S.H., M.H. NIP. 198007162000021001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	sda.
24.	AGUNG PRIANTO, S.H. NIP. 197208271999031002	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	sda.

1	2	3	4	5	6
25.	WAHYU EKA PUTRA, A.Md.Im., S.H., M.M. NIP. 198105222000121002	Pembina (IV/a)	Wakil Direktur I Politeknik Imigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
26.	MAULIDI HILAL, S.H., M.Si. NIP. 196905181992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	sda.
27.	MULYADI, Bc.I.P., S.H., M.Si. NIP. 196801101990031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	sda.
28.	HERMAN SAWIRAN, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 196601171990011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	sda.
29.	SUGITO, S.T. NIP. 197609062003011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	sda.
30.	Dr. HARNIATI, S.H., LL.M. NIP. 196805301998032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	sda.
31.	ZULHAIRI, S.H. NIP. 197112192003121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	sda.
32.	YULIUS SAHRUZAH, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 196907171993031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang	sda.
33.	KADIYONO, Bc.I.P., S.I.P., M.Si. NIP. 196705281992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	sda.

1	2	3	4	5	6
34.	R BARTHOLOMEUS DANANG YUDIawan, Bc.I.P., S.I.P., DEA NIP. 196607301988111001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
35.	HERI AZHARI, Bc.I.P., S.Sos. NIP. 196605121990031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	sda.
36.	YUDI SUSENO, Bc.I.P., S.Pd., M.Si. NIP. 196905171992031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	sda.
37.	FELUCIA SENGKY RATNA, S.H., M.Si. NIP. 197909292000122001	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	sda.
38.	DULYONO, S.H., M.H. NIP. 196808081993031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	sda.
39.	Dra. EVA GANTINI, M.Si. NIP. 196906221994032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	sda.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY